

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI DAN PERATURAN EKSPOR SENJATA SWEDIA

Swedia adalah negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan luar negeri feminis. Kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas masih adanya diskriminasi dan subordinasi yang masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari atas perempuan dan anak-anak perempuan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia (Handbook Sweden's feminist foreign policy, 2018). Kebijakan luar negeri feminis ini memerlukan penerapan perspektif kesetaraan gender yang sistematis di seluruh kebijakan luar negeri. Satu titik awal adalah bahwa kesetaraan gender menjadi tujuan itu sendiri, tetapi juga penting untuk mencapai tujuan keseluruhan Pemerintah lainnya, seperti perdamaian, keamanan dan pembangunan berkelanjutan (Gender equality policy in Sweden, 2016).

A. Kebijakan Luar Negeri Feminis

Kebijakan luar negeri Swedia sangat diinformasikan oleh Resolusi Dewan Keamanan 135 tentang *Women, Peace and Security* (WPS) sebagai kerangka normative untuk kebijakan luar negeri dan keamanan. Komitmen normative WPS ini juga ada dalam orientasi kebijakan luar negeri dari beberapa negara lain. Menteri luar negeri wanita pertama Australia, Julie Bishop secara aktif mempromosikan isu-isu WPS selama masa jabatannya, khususnya dengan mendorong pengarusutamaan gender dalam berbagai forum internasional. Mantan menteri luar negeri Inggris William Hague berhasil menggalang perhatian internasional dalam pencariannya

untuk mengakhiri kekerasan seksual dalam konflik (Beeson & Hameiri, 2017). Hillary Clinton menyatakan sejak awal jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri AS bahwa kebijakan pembangunan internasional AS perlu untuk lebih memperdayakan perempuan di negara berkembang. Selain itu, Clinton membingkai status perempuan sebagai masalah keamanan nasional dan ia memainkan peran penting dalam mendorong dukungan dalam Resolusi Dewan Keamanan 1888 (2009) tentang kekerasan seksual dan berbasis gender dalam konflik bersenjata (Hudson & Leidl, 2015).

Ketika pemerintah koalisi Swedia yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau berkuasa pada tahun 2014 dan menyatakan kebijakan luar negeri feminis, hal ini sangat menarik perhatian media internasional. Arah normative baru dalam kebijakan luar negeri Swedia terkait erat dengan Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom yang merupakan advokat keadilan gender dalam pekerjaan PBB setelah memegang posisi perwakilan khusus PBB pertama tentang kekerasan seksual dalam konflik. Dalam menanggapi pertanyaannya yang sering diajukan tentang apa persisnya kebijakan luar negeri feminis, Wallstrom merujuk pada *feminist toolbox* yang terdiri dari tiga R (*Rights, Representations, Resources*) (Speech by the Minister for Foreign Affairs at the United States Institute for Peace, 2015). Dengan kata lain, Swedia berusaha untuk mempromosikan representasi dan partisipasi perempuan dalam politik secara umum dan dalam proses perdamaian pada khususnya untuk mengadvokasi hak-hak wanita sebagai hak asasi manusia termasuk perlindungan wanita dari kekerasan seksual yang berbasis gender dan

bekerja menuju distribusi pendapatan global dan sumber daya alam yang lebih peka dan adil.

Pada dasarnya, kebijakan luar negeri feminis Swedia adalah sebuah metode kerja dan perspektif yang mengambil tiga R sebagai titik awal (Handbook Sweden's feminist foreign policy, 2018):

- ***Rights***

Dinas Luar Negeri Swedia akan mendorong semua perempuan dan anak-anak perempuan untuk dapat menikmati hak asasi manusia, termasuk dengan memerangi segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang membatasi kebebasan bertindak mereka. Data yang dikeluarkan oleh *The World Bank* (2018) memperlihatkan bahwa terdapat 104 negara di seluruh dunia memiliki undang-undang yang mencegah perempuan melakukan pekerjaan tertentu (misalnya di pertambangan, manufaktur, air dan transportasi). Di 18 negara, pria dapat secara hukum mencegah istri mereka untuk bekerja. 59 negara tidak memiliki undang-undang yang melarang pelecehan seksual di tempat kerja. 123 negara tidak memiliki undang-undang tentang pelecehan seksual dalam pendidikan. 37 negara tidak memiliki undang-undang untuk melindungi karyawan yang hamil agar tidak diberhentikan. 45 negara tidak memiliki undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan di rumah.

- ***Representations***

Dinas Luar Negeri Swedia akan mempromosikan partisipasi dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua level dan di semua

bidang dan harus mencari dialog dengan perwakilan perempuan di semua tingkatan termasuk di masyarakat sipil. Situasi pada saat ini sendiri secara statistik dari tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya ada 17 kepala negara wanita di semua negara di dunia. Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh *Inter-Parliamentary Union* pada Maret 2018, 193 negara diberi peringkat berdasarkan proporsi perempuan di parlemen, dengan Rwanda, Bolivia dan Kuba berada di urutan teratas. Swedia menempati urutan ketujuh, dengan 43,6% wanita (Women in national parliaments, 2018). Sebuah penelitian terhadap 31 proses perdamaian utama antara 1992 dan 2011 mengungkapkan bahwa hanya 9% dari perunding adalah perempuan. Dari mereka yang menandatangani perjanjian damai, lebih dari 96% adalah laki-laki (Preventing conflict transforming justice securing the peace, 2015).

- ***Resources***

Dinas Luar Negeri Swedia akan bekerja untuk memastikan bahwa sumber daya akan dialokasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua wanita dan anak-anak perempuan untuk menikmati hak asasi manusia. Dinas Luar Negeri Swedia juga akan mempromosikan langkah-langkah yang ditargetkan untuk berbagai kelompok sasaran. Masih banyak negara yang belum mendistribusikan sumber daya yang sama. Perempuan memiliki kurang dari 20% sumber daya lahan dunia. Di banyak negara, perempuan tidak memiliki hak hukum untuk memiliki tanah (Villa, 2017). Secara global, dibandingkan dengan laki-laki, perempuan 300 juta lebih sedikit memiliki ponsel (Women & Mobile: A Global Opportunity, 2018). Ini membatasi

peluang perempuan untuk mengakses informasi dan partisipasi mereka dalam mengakses berbagai layanan digital yang disediakan melalui *smartphone*.

Implikasinya adalah bahwa Dinas Luar Negeri Swedia di semua bagiannya harus berusaha untuk memperkuat semua perempuan dan hak-hak perempuan berdasarkan realita di mana mereka tinggal. Kebijakan luar negeri feminis Swedia adalah suatu agenda transformatif yang bertujuan untuk mengubah struktur dan meningkatkan visibilitas perempuan dan anak-anak perempuan sebagai aktor (Swedish Foreign Service action plan for feminist foreign policy 2015–2018, including indicative measures for 2018, 2018). Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender di semua tahapan dan konteks kehidupan harus ditiadakan. Kebijakan ini didasarkan pada interseksionalitas, yang berarti mempertimbangkan fakta bahwa orang memiliki kondisi kehidupan yang berbeda, baik pengaruhnya maupun kebutuhannya (Gender equality policy in Sweden, 2016).

Menteri luar negeri Swedia Margot Wallstrom sendiri mengatakan bahwa:

“Di seluruh dunia, wanita diabaikan dalam hal sumber daya, representasi dan hak. Ini adalah alasan sederhana mengapa kita mengeluarkan kebijakan luar negeri feminis dengan kekuatan penuh di seluruh dunia” (Get inspired by the new handbook for feminist foreign policy, 2018)

Kebijakan luar negeri Swedia telah lama dicirikan oleh perspektif hak dan gender yang jelas. Namun, kebijakan luar negeri feminis ini mewakili peningkatan ambisi. Kebijakan ini juga merupakan bagian integral dari kerja pemerintah feminis dan kelanjutan dari kebijakan kesetaraan gender nasional selama bertahun-tahun

(Sweden's feminist foreign policy – examples from three years of implementation, 2017).

Sebagai sebuah negara, Swedia sudah sejak lama membangun dan memiliki identitas tersendiri dengan kebijakan kesetaraan gender progresif yang menampilkan reformasi sosial untuk memperkuat perempuan dan anak-anak perempuan di setiap tahap kehidupan dan di semua forum, seperti perpajakan yang terpisah, ketentuan pengasuhan anak yang murah hati dan pembagian cuti orang tua yang netral gender. Hak atas aborsi yang diperkenalkan pada tahun 1974 juga membantu memperkuat hak-hak wanita. *The Swedish Gender Equality Act* diperkenalkan pada tahun 1979 untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang setara dan bebas dari diskriminasi. Bersamaan dengan inisiatif ini, mulai banyak muncul gerakan-gerakan yang dipimpin oleh kaum perempuan. Masalah yang sebelumnya dianggap sebagai ‘masalah wanita’ muncul di agenda umum untuk kebijakan domestik Swedia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Swedia dalam hal kesetaraan gender di negaranya adalah: “Perempuan dan laki-laki dapat memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri”. Dengan tujuan ini sebagai titik awalnya, pemerintah bekerja untuk enam sub-tujuan (Gender equality policy in Sweden, 2016):

1. Equal division of power and influence

Perempuan dan laki-laki harus memiliki hak dan perlakuan yang sama untuk menjadi warga negara yang aktif dan untuk membentuk kondisi untuk pengambilan keputusan.

2. Economic equality

Perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan dan kondisi yang sama terkait dengan pendidikan dan pekerjaan berbayar yang memberikan kemandirian ekonomi sepanjang hidup.

3. Equal education

Perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki harus memiliki kesempatan dan kondisi yang sama terkait dengan pendidikan, pilihan belajar dan pengembangan pribadi.

4. Equal distribution of unpaid housework and provision of care

Perempuan dan laki-laki harus memiliki tanggung jawab yang sama untuk pekerjaan rumah tangga dan memiliki kesempatan untuk memberi dan menerima perawatan dengan ketentuan yang setara.

5. Equal health

Perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki harus memiliki kondisi yang sama untuk kesehatan yang baik dan diberikan perawatan dengan persyaratan yang sama.

6. Men's violence against women must stop

Wanita dan pria, anak perempuan dan anak laki-laki harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk integritas fisik.

Kebijakan luar negeri feminis ini merupakan bagian dari struktur feminis yang lebih besar. Swedia mengeluarkan komunikasi pemerintah “kekuatan, tujuan dan agensi kebijakan feminis untuk masa depan gender yang setara” pada tahun

2016. Dalam komunikasi ini, pemerintah Swedia mempresentasikan fokusnya dalam kebijakan kesetaraan gender termasuk organisasi untuk implementasi, sistem pemantauan, strategi nasional sepuluh tahun untuk mencegah dan memerangi kekerasan laki-laki terhadap perempuan, dan struktur baru untuk sub-tujuan. Sebagai titik awal untuk pekerjaan ini (Government Communication 'Power, goals and agency - a feminist policy for a gender-equal future, 2016), Swedia memiliki pemerintahan yang feminis. Kebijakan kesetaraan gender pemerintah didasarkan pada tujuan keseluruhan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri.

kesetaraan gender adalah masalah keadilan dan bagian penting dalam membangun masyarakat. Kesetaraan gender juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi perempuan dan laki-laki. Kebijakan kesetaraan gender pemerintah mengambil titik awal pengetahuan dan pemahaman bahwa gender dan kekuasaan diciptakan dan dipelihara secara struktural di semua bagian masyarakat. Jenis kelamin sangat penting bagi peluang dan kondisi orang-orang pada tingkat individu, organisasi dan masyarakat dan pada setiap tahap kehidupan.

Swedia masih menampilkan perbedaan yang signifikan dalam kondisi kehidupan antara perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan sistematis antara perempuan dan laki-laki dalam hal kekuasaan dan pengaruh, pendidikan, pekerjaan, posisi, pendapatan, gaji dan karir, pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan kepedulian serta paparan terhadap kekerasan dan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan kesetaraan gender yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk

menciptakan keadilan antara wanita dan pria, anak perempuan dan anak laki-laki. Kebijakan kesetaraan gender juga merupakan bagian utama dari pekerjaan untuk memastikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia internasional Swedia. Swedia akan menjadi teladan bagi kesetaraan gender, baik secara nasional maupun internasional.

B. Tujuan Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia

Tujuan di bawah ini menetapkan arah kebijakan luar negeri feminis Swedia untuk 2015-2018. Ini adalah tujuan luas untuk mencocokkan tantangan yang luas dan memungkinkan untuk bekerja secara holistik dengan menggunakan instrumen kebijakan luar negeri yang terkoordinasi. Oleh karena itu, tindakan dapat diambil sejalan dengan kebijakan untuk pembangunan global (Swedish Foreign Service action plan for feminist foreign policy 2015–2018, including indicative measures for 2018, 2018).

Kebijakan luar negeri feminis Swedia harus berkontribusi pada kesetaraan gender dan semua wanita dan anak-anak perempuan yang benar-benar dapat menikmati hak asasi manusia. Untuk melaksanakan ini, Dinas Luar Negeri Swedia telah menyusun rencana tindakan yang diperbarui setiap tahun, dengan enam tujuan eksternal jangka panjang.

Enam tujuan eksternal ini merupakan tujuan individu, tetapi tujuan-tujuan ini juga berkontribusi pada tujuan keseluruhan yang sama, yaitu dunia yang setara gender. Tujuannya juga saling memperkuat dan bergantung satu sama lain. Dengan meningkatkan akses perempuan dan anak-anak perempuan ke hak-hak seksual dan

reproduksi, perubahan positif misalnya dapat diamati dalam pemberdayaan ekonomi perempuan (Lee, 2017). Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan dan memiliki lebih banyak perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dapat mengarah ke reformasi sosial yang lebih produktif (Why women in politics, 2017). Contoh lain adalah bahwa legislasi yang lebih kuat untuk hak-hak perempuan mengarah pada peningkatan partisipasi bagi perempuan di masyarakat (Democracy, human rights and women's political empowerment, 2018).

Keenam tujuan eksternal dalam rencana aksi untuk tahun 2015-2018 (Swedish Foreign Service action plan for feminist foreign policy 2015–2018, including indicative measures for 2018, 2018), yaitu:

1. Full enjoyment of human rights

Dinas Luar Negeri Swedia akan bekerja untuk semua wanita dan anak-anak perempuan yang menikmati hak asasi manusia dalam pekerjaan multilateral, regional dan bilateral serta di dalam melalui Uni Eropa. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak perempuan dapat mempengaruhi mereka, antara lain, hak mereka atas pendidikan, pekerjaan, keamanan, partisipasi politik, kehidupan keluarga dan kontrol atas tubuh mereka sendiri. Diskriminasi gender juga diperkuat oleh diskriminasi dan kerentanan terkait dengan faktor-faktor lain seperti kemiskinan, konflik, migrasi, iklim, asal etnis, variasi fungsional dan orientasi seksual atau identitas gender.

Swedia menggunakan sejumlah platform, peran dan alat yang berbeda dalam pekerjaan ini. Hal ini dilakukan, misalnya dengan secara teratur menerbitkan laporan negara tentang hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum dan dengan mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk perempuan. Swedia juga terus mempertajam fokus kesetaraan gender dari kerjasama pembangunannya termasuk melalui strategi global baru. Swedia juga, misalnya:

- Memenangkan inklusi kesehatan reproduksi seksual dan hak reproduksi dalam resolusi Majelis Umum pada anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa.
- Bekerja untuk dapat memberikan dan memperkuat hak asasi untuk para migran dan perempuan pengungsi.
- Mengambil langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dan langkah-langkah terhadap kekerasan seksual dan yang terkait dengan gender ke dalam upaya kemanusiaan dan proses reformasi kemanusiaan.

2. Freedom from physical, psychological and sexual violence

Kebebasan dari kekerasan adalah prasyarat untuk pembangunan. Kekerasan dalam rumah tangga di mana pasangan menjadi seorang pelaku adalah penyebab utama cedera pada wanita. 125 negara telah melakukan legislasi terhadap kekerasan domestik, tetapi 603 juta perempuan tinggal di negara-negara di mana kekerasan domestik tidak dapat dihukum (Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice, 2011). Di semua negara, perempuan dan anak-anak perempuan menghadapi

resiko terkena kekerasan atau pelecehan seksual atau terkait gender di ruang publik yang secara serius membatasi kebebasan bergerak mereka. Dengan cara yang sama, peluang perempuan untuk dapat memberikan pengaruh dan menjadi partisipasi politik dibatasi oleh pelecehan yang ditunjukkan kepada perempuan yang aktif dalam forum publik seperti politisi, aktivis hak asasi manusia dan jurnalis. Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan dapat mempengaruhi baik individu maupun masyarakat pada umumnya dan merupakan penghalang bagi kesetaraan gender dan pembangunan. Dalam banyak konflik, perempuan dan anak-anak perempuan adalah sasaran langsung bagi kekerasan seksual dan kekerasan terkait gender dan para pelakunya ini jarang sekali terkena hukum.

Kekerasan terkait gender terjadi di semua masyarakat dan negara terlepas dari tingkat pendapatan atau pendidikan. *The World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa satu dari tiga wanita telah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan atau kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan. WHO juga memperkirakan bahwa 30-60% dari semua wanita telah mengalami serangan fisik dan atau seksual dalam hidup mereka (*Violence against women*, 2017). Pada tahun 2014, *The European Institute for Gender Equality* (EIGE) mempublikasikan perkiraan pengeluaran uang yang telah dikeluarkan oleh negara-negara di Uni Eropa setiap tahun untuk mengatasi kekerasan terkait gender. Setiap tahunnya Uni Eropa harus mengeluarkan EUR 256 miliar (*Estimating the costs of gender-based violence in the European Union*, 2018).

Di antara inisiatif lain, Swedia telah bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan menetralkan norma maskulinitas destruktif, memperkuat kemampuan negara untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku, membantu korban kejahatan dan merehabilitasi tentara. Swedia juga memberikan kontribusi untuk pengetahuan yang lebih baik tentang hubungan antara penyebaran senjata yang tidak terkendali dan kekerasan terhadap perempuan yang telah berkontribusi pada beberapa aktor yang telah bergabung untuk melawan kekerasan terkait gender. Swedia juga, misalnya:

- Mendukung organisasi dalam masyarakat sipil dan aktor-aktor lain yang bekerja untuk melawan kekerasan berbasis gender termasuk melalui pusat-pusat dukungan, saluran bantuan dan dukungan hukum bagi perempuan yang rentan serta bekerja dengan para pelaku dan pengaruh politik.
- Menjadi pendonor terbesar bagi *UN Women* dan *UN Action Against Sexual Violence in Conflict*.
- Melakukan pekerjaan ekstensif untuk menyoroti hubungan antara norma maskulinitas destruktif, kekerasan dan konflik.

3. Participation in preventing and resolving conflicts, and post-conflict peacebuilding

Di negara-negara yang terkena dampak konflik, perempuan bekerja untuk perdamaian setiap hari dengan hasil yang baik, tetapi seringkali dengan sedikit pengakuan. Studi menunjukkan bahwa proses perdamaian inklusif adalah yang paling berkelanjutan, tetapi kerja perdamaian formal dan internasional tetap tidak setara.

Swedia telah berkontribusi terhadap peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian di Amerika Latin serta di Asia, Afrika dan Timur Tengah dan telah membentuk dan mendorong jaringan mediator perempuan. Swedia juga telah menjadikan perempuan, perdamaian dan agenda keamanan (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dan resolusi berikutnya) menjadi prioritas utama di dalam Dewan Keamanan PBB. Swedia juga, misalnya:

- Berkontribusi pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam upaya perdamaian di negara-negara seperti Kolombia, Mail, Suriah, Afghanistan, Myanmar dan Somalia melalui dukungan politik, teknis dan keuangan. Swedia telah berkontribusi pada perjanjian perdamaian Kolombia yang menampilkan perspektif kesetaraan gender yang jelas dan dengan demikian dapat berfungsi sebagai model bagi orang lain.
- Mendukung keterlibatan wanita Suriah dalam proses politik di tingkat lokal dan internasional serta dalam *the opposition Women's Advisory Committee* (WAC).
- Berkontribusi ke negara lain yang menyusun dan melaksanakan rencana aksi nasional untuk wanita, perdamaian dan keamanan termasuk di Afghanistan, Bosnia dan Herzegovina, Irak, Kanada, Myanmar, Republik Ceko dan Sudan.

4. Political participation and influence in all areas of society

Para wanita di dunia kurang terwakili di berbagai tingkatan untuk sebagai pemilih, politisi, hakim, pemimpin dalam organisasi, di industri dan di dunia akademis. Representasi yang lebih setara menguntungkan baik masyarakat maupun

individu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika badan pengambil keputusan lebih setara maka mereka akan lebih aktif untuk membahas isu-isu kesetaraan gender, agenda serta alokasi sumber daya mereka pun akan mencerminkan lebih banyak kelompok dan kebutuhan dalam masyarakat (Wangnerud, 2009).

Swedia telah berkontribusi terhadap partisipasi politik perempuan di beberapa negara dan telah mendukung para aktivis hak asasi manusia serta melakukan kegiatan advokasi aktif sehubungan dengan kebebasan berbicara dan berpendapat. Swedia juga telah memperjuangkan strategi kesetaraan gender di bank pembangunan dan dana lingkungan dan iklim dan telah mengambil peran utama dalam prakarsa *Gender Champions Internasional* di Jenawa dengan tanggung jawab khusus untuk masalah representasi. Swedia juga, misalnya:

- Bekerja untuk memperkuat perlindungan bagi jurnalis wanita, aktivis hak asasi manusia, juru kampanye lingkungan, politisi dan pekerja budaya serta mereka yang membela hak perempuan dan anak perempuan atas hak asasi manusia.
- Membantu dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi wanita dan aktor-aktor lain untuk menyoroti, mendukung dan memperkuat para pembela hak asasi wanita dan orang-orang lain yang membela semua wanita dan anak-anak perempuan yang menikmati hak asasi manusia.
- Berkontribusi terhadap kesetaraan gender yang lebih besar di partai politik di negara berkembang melalui kerja sama dengan organisasi afiliasi pihak Swedia.

5. *Economic rights and empowerment*

Ketika perempuan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja maka pemberdayaan ekonomi mereka akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Masyarakat juga akan berkembang karena perempuan menginvestasikan pendapatan mereka pada masyarakat lokal, kesehatan dan pendidikan anak-anak. Oleh karena itu berinvestasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan sangatlah membangun. Meskipun demikian, banyak perempuan yang tidak memiliki hak ekonomi dan dengan demikian, kesempatan untuk mewarisi, memiliki dan menggunakan tanah tidak akan didapat oleh kaum perempuan. Mereka hanya akan menjadi seorang karyawan yang hal ini sangat terbatas bagi kaum perempuan.

Swedia telah berkontribusi pada pendidikan anak perempuan dan pekerjaan wanita, hal ini telah menjadi kekuatan pendorong dalam perspektif kesetaraan gender dalam perjanjian tentang tujuan global dan pembiayaan untuk pembangunan serta telah memperjuangkan kerja kesetaraan gender dalam kebijakan perdagangan dan perusahaan yang berkelanjutan. Selain itu Swedia telah menyoroti tanggung jawab laki-laki untuk pekerjaan kesetaraan gender melalui inisiatif seperti kampanye *He for She*. Swedia juga misalnya:

- Berkontribusi untuk rekomendasi pusat dari forum ekonomi terkemuka, seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia dalam menekankan pentingnya memasukkan pertumbuhan dan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.

- Berkontribusi pada perspektif kesetaraan gender yang disempurnakan dalam pekerjaan organisasi internasional dalam bidang kebijakan perdagangan, misalnya dalam negosiasi, statistik dan analisa dan berkontribusi pada Uni Eropa yang mendorong masalah ini ke depan dalam badan seperti *World Trade Organization* (WTO) dan negosiasi tentang perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan negara-negara ketiga.
- Berkontribusi pada aspek kesetaraan gender yang telah terlihat dalam upaya *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini telah dicapai melalui kerja bilateral yang intensif dengan tujuan untuk memperkuat peran dan hak-hak wanita dalam pasar tenaga kerja di negara-negara seperti Iran, Kamboja, Kroasia, Nigeria, Polandia dan Turki.
- Mendukung program *Organization for Economic Co-operation and Development's* (OECD) di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berfokus pada perusahaan dengan kesadaran kesetaraan gender dan telah berkontribusi dalam pembentukan forum pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan peluang ekonomi perempuan di wilayah tersebut.

6. *Sexual and reproductive health and rights* (SRHR)

Sexual and reproductive health and rights (SRHR) adalah hak asasi manusia yang sangat penting untuk kesehatan dan kondisi hidup perempuan dan anak-anak perempuan. SRHR melibatkan hak setiap individu yang jelas untuk memutuskan atas tubuh mereka sendiri, tetapi juga memiliki pengaruh langsung pada segala hal

mulai dari tingkat pendidikan hingga ekonomi sosial. Meskipun demikian, SRHR tetap menjadi subjek kontroversial di banyak bagian negara.

Swedia telah meningkatkan kerja SRHR karena resistensi terhadap isu-isu ini telah berkembang. Swedia bekerja melalui pembangunan aliansi, posisi dewan, kerjasama pembangunan dan dialog termasuk dengan memulai gerakan global dengan hashtag *#SheDecide*. Di tingkat negara, pekerjaan ini berkontribusi pada lebih banyak bidan dan akses yang lebih baik dalam pendidikan hubungan seks, kontrasepsi dan aborsi. Swedia juga, misalnya:

- Menyediakan *The United Nations Population Fund* (UNFPA) dengan dukungan inti yang luas yang selama tahun 2014-2015 telah memungkinkan untuk mencegah lebih dari 600.000 kehamilan yang tidak direncanakan, 200.000 aborsi yang tidak aman dan 900 kasus kematian ibu melahirkan serta menyediakan lebih dari 1,6 juta orang dengan kontrasepsi.
- Memberi tekanan pada Komisi Eropa untuk secara paksa membela SRHR dan memasukkan SRHR dalam pelaporan tahunannya tentang pelaksanaan rencana aksi Uni Eropa untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam hubungan eksternal Uni Eropa (2016-2017).

(Tambahan)

C. Peraturan ekspor senjata

Peraturan ekspor nasional saat ini terdiri dari *the Swedish Military Equipment Act* (1992) dan *corresponding Military Equipment Ordinance* (1992) yang keduanya berlaku pada tahun 1993. Ada juga pedoman nasional yang harus

diterapkan dalam kombinasi dengan undang-undang ini. tidak satupun dari dokumen-dokumen ini termasuk dalam ketentuan gender (Gerome, 2016).

The Swedish Inspectorate for Strategic Product (ISP) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan kontrol pada ekspor senjata (About the ISP, 2017). Tanggung jawab untuk melakukan penilaian ekspor dipindahkan dari pemerintah ke ISP pada tahun 1996. ISP adalah otoritas independen di bawah Kementerian Luar Negeri Swedia. Kementerian luar negeri memberikan panduan kebijakan secara keseluruhan, tetapi ISP secara independen bertanggung jawab untuk keputusan perizinan individual. Pemerintah (atau menteri) tidak diperbolehkan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kasus-kasus individual. Keterbatasan ini secara konstitusional diabadikan dan dimaksudkan untuk memastikan penerapan hukum yang tidak memihak. Pekerjaan ISP dilakukan dalam kerja sama erat dengan otoritas lain seperti bea cukai Swedia. Polisi Swedia bertanggung jawab untuk otorisasi transfer senjata api sipil dan amunisi di dalam Uni Eropa (Sweden national control system and list, 2014).

Semua yang berurusan dengan ekspor akan dilaporkan ke *the Export Control Council (ECC)* yang merupakan badan penasihat parlemen yang ditunjuk oleh pemerintah. Kasus-kasus di mana ISP membutuhkan saran sebelum mengambil posisi, misalnya mengenai negara penerima baru atau negara-negara di mana perkembangan membutuhkan penilaian baru akan dirujuk ke ECC. ISP kemudian dapat meminta saran yang tidak mengikat dari dewan. Ketua ECC adalah Direktur Jendral ISP dan perwakilan dari menteri luar negeri dan kementerian

pertahanan Swedia juga berpartisipasi dalam pertemuan ECC (About the ISP, 2017).

ISP ini memiliki sekitar 25 orang, beberapa diantaranya adalah pakar hukum internasional dan memiliki keahlian dalam hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional. Direktur Jenderal ISP saat ini adalah Christer Ahlstrom, *Associate Professor of International Law di Uppsala University*. Namun, Ahlstrom tidak memiliki spesifikasi dalam gender maupun pembangunan, menurut Ahlstrom “isu-isu gender dan pembangunan biasanya akan dirujuk ke Dewan Pengendalian Ekspor dan dalam pengaturan itu, kementerian luar negeri yang tentu saja memiliki keahlian dalam gender dan pembangunan akan berpartisipasi dalam diskusi.” (Gerome, 2016)

ISP telah mengindikasikan bahwa *Gender Based Violence* (GBV) menjadi pertimbangan dalam proses penilaian resiko. “Ketika datang ke penilaian, kami melihat situasi keseluruhan di negara penerima,” kata Direktur Jenderal ISP Ahlstrom. “Jika itu adalah negara yang mengalami masalah internal atau konflik bersenjata, negara-negara itu tidak akan memenuhi syarat sebagai penerima untuk ekspor senjata Swedia.” Menurut Ahlstrom, resiko pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional biasanya diurus dengan fakta bahwa Swedia tidak mengekspor ke negara-negara yang berada dalam konflik bersenjata. “Saya pikir *Gender Based Violence* adalah masalah lintas sektoral. Ini terkait dengan berbagai bidang hukum internasional, hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. ATT telah menempatkan fokus khusus pada kekerasan berbasis gender dengan referensi spesifiknya terhadap *Gender Base Violence*.” (Gerome, 2016)

The Arms Trade Treaty (ATT) and the UN Programme of Action on small arms and light weapons (UNPoA) memiliki sejumlah persyaratan kelembagaan yang diperlukan untuk mengontrol secara efektif perdagangan senjata dan kerja sama antar negara. ATT mensyaratkan negara-negara untuk menetapkan *national point of contact* dan badan koordinasi nasional yang menyimpan catatan nasional ekspor, penerbitan otorisasi dan menyampaikan laporan. Demikian pula UNPoA merekomendasikan agar negara menunjuk *national point of contact* serta membentuk badan koordinasi nasional yang memberikan panduan kebijakan, melakukan penelitian dan memantau upaya mencegah perdagangan senjata gelap (Gerome, 2016).

D. Kesimpulan

Pada tahun 2014, Swedia menjadi negara pertama di dunia yang menetapkan kebijakan luar negeri feminis. Kebijakan luar negeri feminis Swedia sendiri merujuk pada feminist toolbox yang terdiri dari tiga R (*Rights, Representations, Resources*) yang berusaha untuk mempromosikan representasi dan partisipasi perempuan dalam politik secara umum dan dalam proses perdamaian pada khususnya untuk mengadvokasi hak-hak wanita sebagai hak asasi manusia termasuk perlindungan wanita dari kekerasan seksual yang berbasis gender dan bekerja menuju distribusi pendapatan global dan sumber daya alam yang lebih peka dan adil. Tujuan yang ingin dicapai oleh Swedia dalam hal kesetaraan gender di negaranya sendiri adalah agar perempuan dan laki-laki dapat memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan utama ini Swedia telah menyusun rencana tindakan yang

diperbarui setiap tahun dengan enam tujuan eksternal jangka panjang; 1.) *Full enjoyment of human rights* 2.) *Freedom from physical, psychological and sexual violence* 3.) *Participation in preventing and resolving conflicts and post-conflict peacebuilding* 4.) *Political participation and influence in all areas of society* 5.) *Economic rights and empowerment* 6.) *Sexual and reproductive health and rights.*

Penerapan kebijakan luar negeri feminis ini juga berlaku pada peraturan ekspor senjata yang dimiliki oleh Swedia. Swedia sendiri dalam mengekspor senjatanya akan selalu berpatokan pada *Gender Based Violence* yang ini akan selalu menjadi pertimbangan dalam mengekspor senjata ke berbagai negara. Apakah dalam negara yang dituju sedang mengalami konflik, ataupun masih adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

